

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur:

- Alatas, S. H. 1986. *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*. Jakarta: LP3ES.
- Atmasasmita, Romli. 1983. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Bina Cipta.
- Effendy, Marwan. 2005. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Frid, A.Z Abidin. 1981. *Sejarah dan Perkembangan Asas Opportunitasdi Indonesia*. Ujung Pandang: UNHAS.
- Focus Andrea dalam M. Prodjohamidjoyo. 2001. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hamzah, Andi. 2008. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah, Andi. 2009. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy OS. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cetakan 8*. Jakarta: Ballai Pustaka.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar, Cetakan Kelima*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar, Cetakan Keenam*. Yogyakarta: Liberty.
- Mochtar Lubis dan James C. Scott. 1995. *Bunga Rampai Korupsi, Cetakan Ketiga*. Jakarta: LP3ES.
- Poernomo, Bambang. 1988. *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Sartono. 2016. *Himpunan Peraturan Barang Rampasan Negara*. Jakarta: Biro Keuangan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Simanjuntak, Nicolas. 2009. *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum* Cetakan 1. Bogor: Ghalia Indonesia.

Siregar, Doli D. 2002. *Optimalisasi Pemberdayaan Harta Kekayaan Negara*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Soekanto, Soerjono. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soekanto, Soerjono. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Sunaryo & Ajen Dianawati, 2009. *Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Visimedia.

Yahya Harahap, M. 1998. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*. Jakarta: Pustaka.

Yahya Harahap, M. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Edisi Kedua) seri: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yahya Harahap, M. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yanuar, Purwaning. M. 2007. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.

Jurnal dan Karya Ilmiah lainnya:

Angkow, Prima Harly. 2013. *Pelaksanaan Uoaya Paksa Penahan dalam Pemeriksaan Tersangka Menurut KUHAP*. Jurnal, *Lex Societatis* Vol.7 Nomor 3. Juli 2013. Manado: Universitas Sam Ratulangi.

Darmono. 2013. *Penyampingan Perkara Pidana Seponering Dalam Penegak Hukum (Studi Kasus Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Atas Nama Dr. Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah)*. Jakarta: Solusi Publishing.

Nugroho, Hibnu. 2017. *Dominis Litis dan Posisi Sentral Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disampaikan dalam *In House Training* “Prapenuntutan & Pertanggungjawaban Anggaran Penanganan Perkara Tindak Pidana

Umum". Diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung RI di Jakarta, 01 Agustus 2017.

Nugroho, Hibnu dkk. 2017. *Optimalisasi Pemanfaatan Aset Benda Sitaan Negara (Studi Tentang Penyelamatan Aset-Aset Tindak Pidana Korupsi)*. Disampaikan dalam Seminar Nasional & Call Papers Pengembangan Sumber Daya Pedesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VII, 17-18 November 2017 di Java Heritage Hotel Purwokerto.

Putra Prabawa, Gede dkk. 2014. *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Eksistensi Asas Dominus Litis Dalam Perspektif Profesionalisme dan Proporsionalisme Jaksa Penuntut Umum*. Jurnal Arena Hukum Vol.7 Nomor 3 Tahun 2014. Malang: Universitas Brawijaya.

Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

_____, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

_____, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

_____, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1947 tentang Mengurus Barang-Barang yang Dirampas dan Barang-Barang Bukti.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tanggal 13 Juni 2014 tentang Pemulihan Aset

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/3/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-009/A/JA/01/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/PMK.06/2018 tanggal 08 Februari 2018 tentang Lelang Benda Sitaan, Barang

Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi yang Berasal dari
Kejaksaan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara dan Barang Gratifikasi

